

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) BIDANG
PENDIDIKAN DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KOTA
BANDUNG**

***THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL
GOVERNMENT POLICIES ON THE EFFECTIVENESS OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EDUCATION IN. POS
INDONESIA (PERSERO) KOTA BANDUNG***

Haiva Fadhillah Nur Aziz¹, Ero Suhara²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

²suharaero639@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung”.

Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Teori Edwards III dalam Subarsono, (2005:90), berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektivitas digunakan pendekatan teori Duncan, dalam Steers (1985:53) terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi . Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan factor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi”.

Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara implementasi kebijakan dengan Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung.. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

ABSTRACT

The problem in this research is not yet effectiveness Corporate Social Responsibility Program of Educational Field in PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung. Based on the phenomenon, the researchers suspect that the problem is influenced by policy implementation variables. Based on the problem, the formulation of the proposed problem is: "How Much Influence Implementation of Local Government Policy on the Effectiveness of Corporate Social Responsibility Program of Educational Field in PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung".

The analysis of the research problem is done by using the theory of Edwards III Theory Implementation in Subarsono (2005: 90), based on the factors of policy implementation through the dimension of Communication, Resources, Disposition / Implementing Attitudes and Structure of Bureaucracy. As for the effectiveness variables used the Duncan theory approach, in Steers (1985: 53) consists of goal achievement, integration, and adaptation. Based on the theories approach, the proposed hypothesis is: "The magnitude of influence implementation of local government policies on the effectiveness of Corporate Social Responsibility Program of Educational Field in PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung is determined by the implementation of factors Communications, Resources, Disposition / Attitude Executor and Structure Bureaucracy".

Methods in this research is explanatory survey method (explanatory survey method) while the source of data collection by using literature study and field study covering: questionnaire, observation, and interview. Sampling technique used is Simple Random Sampling. The data analysis technique used is linear regression analysis

Based on the results of data processing conducted obtained research results that show a strong and significant relationship between the implementation of policy with the effectiveness of Corporate Social Responsibility of Educational Field in PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung. Thus the hypothesis proposed in this study was tested empirically.

Keywords: *policy implementation, effectiveness of Corporate Social Responsibility Program*

1. PENDAHULUAN

BUMN sebagai unit ekonomi milik negara merupakan sektor yang penting peranannya dalam membantu pemerintah mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. BUMN di dalam konteks perekonomian Indonesia mempunyai tempat yang penting, bukan saja eksistensinya secara tersirat disinggung dalam UUD 1945 dalam Pasal 33 yang mana memiliki posisi strategis bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan juga karena diperlukan investasi untuk produksi barang dan jasa yang tidak menarik atau terlalu besar untuk dapat dilakukan oleh swasta.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pembina seluruh BUMN merespon adanya peningkatan partisipasi BUMN terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kondisi sosial masyarakat, serta lingkungan di sekitar wilayah usaha BUMN dengan menerbitkan Keputusan Menteri Badan

Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN maksimal sebesar 2%. Sasaran strategis PKBL itu sendiri yaitu mendukung kegiatan utama (*core business*) perusahaan, menumbuhkan minat usaha masyarakat di sekitar perusahaan, memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal awal usaha dan tambahan modal kerja bagi mitra, serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mitra dalam mengelola usahanya..

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN yang turut berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial juga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah. Prinsip yang diterapkan PT Pos Indonesia (Persero) antara lain: beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya masyarakat sekitar, kegiatan yang dilaksanakan adalah ingin memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan investasi untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar

perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat dipenuhi secara proporsional.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen, kontribusi, dan cara pengelolaan bisnis yang nantinya berkaitan dengan keputusan perusahaan yang harus mempertimbangkan aspek-aspek yang ada dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan atau Perseroan Terbatas harus memberikan dampak nyata baik kepada pemangku kepentingan dan terlebih lagi khususnya kepada masyarakat sekitar. Sehingga, sebagai PR atau dalam hal ini manajer CSR mampu melakukan 3 generasi CSR yaitu meminimalkan resiko dari kegiatan operasional, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memikirkan isu-isu global dalam memutuskan kegiatan CSR yang baik bagi khalayak atau masyarakat umum yang bersumber dari Perseroan Terbatas itu sendiri. Sehingga kegiatan CSR yang dilakukan tidak sia-sia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat..

Untuk membangun dan memelihara rasa saling percaya antara pemangku jabatan dan masyarakat, secara sistematis PT. Pos Indonesia (Persero) melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diimplementasikan dengan menyalurkan dana bagi penerima bantuan yang terdistribusi untuk obyek bantuan melalui serangkaian kegiatan di beberapa bidang, yaitu : Korban Bencana Alam, Pendidikan dan atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan Masyarakat,

Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum serta Bantuan Sarana Ibadah.

Dari beberapa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang sudah disalurkan kepada beberapa obyek bantuan. Peneliti hanya membahas penelitian pada obyek bantuan pendidikan atau pelatihan. Karena dari lima bidang CSR anggaran yang disiapkan cukup besar yaitu sekitar 30% sampai dengan 40% dari seluruh jumlah anggaran, Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil observasi awal, peneliti memperoleh informasi berupa data laporan yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan Program CSR yang disalurkan kepada masyarakat pada bidang pendidikan pada tahun 2016 hanya terealisasi kurang dari 70%., Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagian besar hanya terpusat di pulau Jawa khususnya di Jawa Barat, hal tersebut disebabkan kantor pusat PT Pos Indonesia berada di Bandung dan yang mengajukan proposal untuk bantuan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bidang pendidikan sebagian besar dari Bandung. Dari jumlah anggaran yang sudah disediakan untuk bidang pendidikan sebesar Rp 700.000.000,- dalam realisasinya hanya tersalurkan sebesar Rp 460.427.000,- atau hanya sebesar 66%. Prinsip yang diterapkan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya masyarakat sekitar dan ingin turut berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi

dengan program-program pemerintah. melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan belum bisa terwujud.

Indikasi-indikasi lain belum terserapnya anggaran Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk bidang pendidikan yang disediakan PT.Pos Indonesia antara lain :

1. Belum terpenuhi jumlah sasaran sesuai target yang kongkrit
2. Program CSR Bidang Pendidikan belum mampu mendukung pendidikan secara merata untuk masyarakat sampai ke pelosok nusantara. Karena banyaknya masyarakat yang tidak tahu adanya bantuan dari PT Pos Indonesia melalui program CSR bidang pendidikan.
3. .Belum terpenuhi jumlah sasaran sesuai target yang kongkrit
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak PT Pos Indonesia kepada masyarakat. Padahal anggaran pendidikan sangat diperlukan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
5. Adanya ketidaktahuan masyarakat bahwa PT Pos Indonesia melaksanakan program CSR bidang pendidikan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan dana pendidikan tersebut tidak akan merasakan keberadaan program CSR bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.
6. Belum memadainya sarana prasarana pendukung untuk

pelaksanaan program CSR Bidang Pendidikan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai kerangka teoritik di dalam penulisan penelitian ini, penulis mengkaji setiap variabel sebagai fokus bahasan yang diteliti. Berikut ini penulis akan menjabarkan keterkaitan antara implementasi kebijakan mengenai efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Pendidikan. Model hubungan antar konsep ini selanjutnya dapat dianggap sebagai kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Selain daripada itu, dalam memenuhi kepentingan penelitian, penulis juga berpedoman kepada beberapa pendapat para ahli dalam membuat model keterkaitan teori dari masing – masing variabel.

Implementasi kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang diupayakan setelah suatu kebijakan ditetapkan secara legal. Dalam proses kebijakan publik, implementasi merupakan tahapan yang sangat strategis. Tahapan implementasi kebijakan tidak akan terlaksana jika sasaran dan tujuan dari diupayakannya implementasi kebijakan tersebut belum ditetapkan. Tanpa adanya persiapan yang matang dalam mengupayakan implementasi tersebut, maka suatu kebijakan tidak akan berfungsi dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Untuk memperlancar proses implementasi kebijakan menurut Haidar, Akib, Antonius, Tarigan yang pendapatnya dikutip dalam buku “Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik” (Mulyadi, 2016; 48), maka perlu

dilakukan diseminasi dengan baik. Adapun syarat pengelola diseminasi kebijakan ada empat, yakni: Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah dan aturan hukum yang telah ditetapkan, adanya kesadaran untuk menerima dan melaksanakan kebijakan yang dianggap logis, adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan secara sah, adanya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi akan kebijakan yang kontroversial namun bermanfaat bagi kehidupan bernegara.

Sedangkan menurut Jones (2004; 166), untuk melaksanakan proses implementasi kebijakan yang efektif harus mealui tiga kegiatan, yakni: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Kemudian secara lebih detail, Soenarko (1998; 210-215) menjabarkan teori yang dikemukakan oleh Jones tersebut. Organisasi dalam implementasi kebijakan menurut Jones, ditujukan sebagai pembentukan unit beserta metode yang perlu diterapkan dalam proses implementasi kebijakan agar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi menurut teori Jones, sebagai suatu upaya untuk memahami apa yang menjadi maksud dari dibuatnya kebijakan tersebut agar kemudian kebijakan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Sedangkan aplikasi dalam implementasi menurut Jones, merupakan upaya diterapkannya segala aturan dan keputusan yang terangkum dalam suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

Merujuk pada apa yang telah dikemukakan oleh Malcolm Goggin, Ann Bowman dan James Lester yang dikutip dalam Nugroho (2014; 670), bahwasannya faktor “komunikasi” yang

dikaitkan dengan variabel bebas, variabel antara dan variabel terikat dapat menjadi penggerak dalam sebuah upaya implementasi kebijakan.

Sementara Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92), agar upaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif maka setidaknya paling sedikit terdapat empat isu pokok yang harus diperhatikan, yakni:

1. Komunikasi, berkaitan dengan cara penyampaian informasi yang berkaitan dengan isi kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi tersebut melibatkan aktor – aktor pembuat kebijakan, para pelaksana dan sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Melalui komunikasi yang dibangun dengan baik, maka diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang jika tidak memadai maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya tentang jumlah kuantitas implementor, tetapi juga termasuk kompetensi yang dimiliki implementor serta sumber daya dalam bentuk lainnya, misalnya finansial.
3. Disposisi/Sikap Pelaksana, berkaitan dengan karakteristik watak yang dimiliki oleh implementor. Misalnya, komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dsb. Disposisi yang baik dapat mempengaruhi potensi sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan akhirnya.
4. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah ditetapkannya standarisasi prosedur operasional atau *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, dengan mengacu pada apa yang telah dikemukakan oleh Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92), untuk mengukur keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan maka penulis akan mencantumkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan Efektivitas, diantaranya pengertian efektivitas menurut Handoko (2001:7) adalah “merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.

Selanjutnya menurut Siagian (2001:24) memberikan definisi sebagai berikut :

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.”

Sedangkan menurut Handoko (2003:7) bahwa :

“Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Dalam mewujudkan efektivitas tersebut, para pegawai/karyawan yang ada dalam organisasi dituntut untuk mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan, berjalan sesuai dengan prosedur dan rencana kerja, serta dapat memanfaatkan waktu kerja sebaik mungkin, sehingga hasil kerja dapat dicapai secara maksimal tanpa adanya kesalahan-kesalahan, dan kalau pun ada dapat ditekan hingga seminimal mungkin.”

Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan, dalam Steers (1985:53). mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya

ditentukan, (2) sasaran merupakan target yang kongkrit, (3) dasar hukum

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisai. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).

2. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Berdasarkan pada ketiga pengukuran dimensi tersebut di atas, dengan demikian dalam meningkatkan efektivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung, yang paling utama adalah keaktifan dari setiap pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hal tersebut tercermin dari adanya pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ini adalah Metode Eksplansi (*Explanatory Research*). Metode ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu

Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Primer. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : Observasi , Wawancara dan Angket. Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah dari Petugas PT.POS Kota Bandung dan masyarakat. Untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan, teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Analisis Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,144	1,892		3,247	,002
Implementasi Kebijakan	,619	,051	,831	12,063	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan

Sumber : Pengolahan SPSS, 2016

Dari tabel di atas akan dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,144 + 0,619X$$

Dimana :

X = Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah

Y = Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan

Persamaan Regresi tersebut memperlihatkan bahwa apabila Implementasi Kebijakan Pemerintah terjadi kenaikan satu satuan, maka Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan akan terjadi kenaikan

Analisis Regresi Linear Sederhana dilakukan untuk mengetahui perubahan variabel bebas dalam hal ini adalah Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah akan mempengaruhi variabel tidak bebas dalam hal ini Variabel Efektivitas Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung Adapun hasil perhitungan persamaan Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan SPSS V.21 adalah sebagai berikut

sebesar 0,619 satuan. Kemudian konstanta yang bernilai 6,144 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi perubahan terhadap variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah maka Variabel efektivitas Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan akan berubah sebesar 6,144 satuan.

4.2 Perhitungan Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh akan dihitung nilai Koefisien Determinasi dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Determinasi (KD)} &= r^2 \\ &\times 100\% \\ &= \\ &(0,836)^2 \times 100\% \end{aligned}$$

=
0,6989 atau 69,82 9 %

Ini memperlihatkan bahwa Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Variabel Efektivitas Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan adalah sebesar 69,89% dan sisanya sebesar 30,11% adalah faktor lain yang mempengaruhi Variabel Efektivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bidang Pendidikan yang tidak diteliti.

a. Uji Hipotesis

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : $\rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung

H_a : $\rho = 0$ Terdapat pengaruh pengaruh Variabel Implementasi

Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung

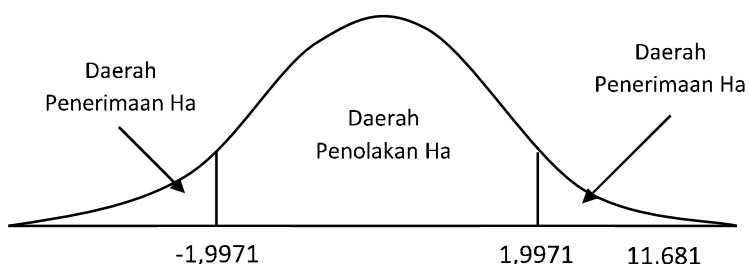
Hipotesis tersebut di atas akan dibuktikan dengan menghitung distribusi student (uji t) yang kemudian akan dibandingkan dengan t-tabel. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{N - 2}{1 - rs^2}}$$

$$t = 0,836 \sqrt{\frac{67 - 2}{1 - 0,836^2}}$$

$$t = 12,283$$

Hasil perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan t-tabel, dimana dari hasil tabel distribusi t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,9971. Ini menunjukkan bahwa nilai t hitung yaitu sebesar 12,283 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,9971 yang dapat digambarkan dalam kurva distribusi normal t sebagai berikut :



Gambar 4.1
Kurva Penerimaan Ha dan Penolakan Ha

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 12,283 berada pada daerah penerimaan H_0 , artinya bahwa t tabel lebih besar dari t hitung, atau H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan.

4.4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah telah banyak model-model yang dikemukakan oleh para pakar, tetapi untuk menganalisis Implementasi Kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92) yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Secara keseluruhan indikator yang diajukan sebanyak 11 (sebelas) indikator. Dari masing-masing variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, pengaruh yang ditimbulkan oleh Implementasi Kebijakan pemerintah terhadap Efektivitas Program Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung adalah sebesar 69,89%. Hal ini menunjukkan adanya variabel lain diluar Implementasi Kebijakan yang memberikan kontribusi terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung sebesar 30,11%.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung tidak terlepas kaitannya dengan implementasi kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel lain yang cukup besar pengaruhnya dan belum dikaji pada penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik,

karena variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah memberi pengaruh terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung, melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan yang turut mempengaruhi Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain implementasi kebijakan, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen publik.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap efektivitas Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) untuk lebih mensosialisasikan Program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) kepada masyarakat diseluruh nusantara yang membutuhkan bantuan terutama dibidang pendidikan.
2. Sebaiknya PT. Pos Indonesia (Persero) lebih meningkatkan sarana prasana pendukung program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan.
3. Hendaknya PT. Pos Indonesia (Persero) kepada Kepala Direktorat PT Pos Indonesia (Persero) lebih berkomitmen dalam bertanggung jawab melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan.
4. Disarankan PT. Pos Indonesia (Persero) hendaknya segera membuat SOP agar program Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) Bidang Pendidikan ini tercapai..

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Handoko T. Hani, 2001, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Edisi II, Cetakan Keempat Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nugroho, Riant. 2003, *Kebijakan publik : formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Siagian Sondang. 2001. *Teori dan praktik kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
Subarsono, A.G. 2011 *Analisis Kebijakan Publik: konsep, Teori dan Aplikasi*.

Suharno. 2009. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press

Steers ,Richard M,1998,*Efektivitas Organisasi Terjemahan Jakarta,Ppm,Erlangga*.

Dokumen

Republik Indonesia, 1945. Tentang UUD'1945

----- 2015 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

_____. 2007 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung